



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



PANGKALAN PSDKP BENOA

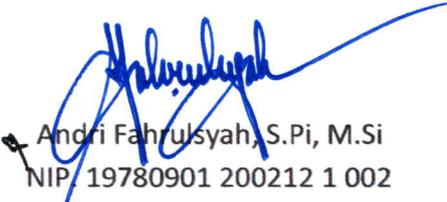
KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) pada Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, disamping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) pada Tahun 2023.

LKj Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Pangkalan PSDKP Benoa dalam kurun waktu Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Pangkalan PSDKP Benoa dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Denpasar, 19 Januari 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Benoa



Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Pangkalan PSDKP Benoa kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Pangkalan PSDKP Benoa telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Benoa menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; ⁽⁵⁾ Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; ⁽⁷⁾ Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁹⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2023 sebesar 104,75%. Seluruh indikator kinerja yang berjumlah 25 indikator telah tercapai sesuai target.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2023 sebesar Rp. 27.832.432.000,00. Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 27.576.997.062,00 dengan persentase 99,08%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2023 sebesar 7,22.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa	2
E. Sistematika Penyajian Laporan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024.....	4
B. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024.....	7
C. Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan.....	9
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	13
A. Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023	13
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	14
C. Efisiensi	52
D. Akuntabilitas Keuangan.....	52
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi	54
LAMPIRAN	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa (Pangkalan PSDKP Benoa) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan SDKP Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Benoa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2023, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

- a. Banyaknya nelayan kapal ijin pusat yang tidak mengetahui bahwa kapal yang berada di bawah 12 mil laut adalah pelanggaran jalur penangkapan ikan;
- b. Cuaca buruk menyebabkan banyak kapal ijin pusat bergerak berlindung di bawah 12 mil laut sehingga menyebabkan banyaknya indikasi pelanggaran daerah atau jalur penangkapan ikan.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Masih banyaknya usaha pemanfaatan ruang laut yang belum mengetahui teknis perijinan pemanfaatan ruang laut;
- b. Unit usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum memiliki dokumen perijinan.

D. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Benoa

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Benoa mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pangkalan PSDKP Benoa menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Benoa membawahi 6 (enam) Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) yaitu sebagai berikut:

1. Satwas SDKP Lombok Timur;
2. Satwas SDKP Jemberana;
3. Satwas SDKP Banyuwangi;
4. Satwas SDKP Probolinggo;
5. Satwas SDKP Lamongan;
6. Satwas SDKP Surabaya.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Pangkalan PSDKP Benoa.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian Pangkalan PSDKP Benoa pada Tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Merujuk kepada Rencana Strategis KKP dimana KKP telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, salah satunya diamanatkan kepada Ditjen PSDKP yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Selain tertuang dalam Renstra KKP, Ditjen PSDKP juga menjalankan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan untuk arah kebijakan Ditjen PSDKP yaitu:

1. Menindak tegas terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing;
2. Tegas terhadap nelayan lokal (KII) yang melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Ditjen. PSDKP tidak melaksanakan fungsi pembinaan tetapi fungsi pengawasan/penegakan hukum;
4. Ditjen. PSDKP sebagai benteng KKP untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui

meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen. PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-1	Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkat	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Kesejahteraan masyarakat KP dibentuk oleh aspek ekonomi dan aspek sosial-kelembagaan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP secara sosial dan kelembagaan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

B. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Benoa 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon III dan Eselon IV lingkup Pangkalan PSDKP Benoa. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Secara ringkas substansi Renstra Pangkalan PSDKP Benoa hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Pangkalan PSDKP Benoa serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pangkalan PSDKP Benoa, maka dirumuskan visi Pangkalan PSDKP Benoa yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Pangkalan PSDKP Benoa menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal PSDKP”

Sejalan dengan visi Pangkalan PSDKP Benoa, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para

pemangku kepentingan kelautan dan perikanan lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa;

- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pangkalan PSDKP Benoa maka dirumuskan beberapa Tujuan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Benoa, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa yang dirumuskan dari Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas
- 2) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan
- 3) Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan
- 4) Terselenggaranya pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas
- 5) Terselenggaranya pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

- 6) Terselenggaranya pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
- 7) Terselenggaranya perawatan kapal pengawas
- 8) Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas
- 9) Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas
- 10) Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas
- 11) Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan
- 12) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan
- 13) Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal
- 14) Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

C. Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru :

1. Penambahan luas Kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota;
3. Pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang ramah lingkungan;
4. Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Pengelolaan sampah plastik di laut.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru, Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengawasi pengelolaan konservasi nasional Gili Matra;
2. Mengawal pelaksanaan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota di Pelabuhan dalam wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa;
3. Mengawasi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Turut serta dalam pelaksanaan kegiatan bulan cinta laut di Bali yang merupakan salah satu kegiatan pengelolaan sampah plastik di laut.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, Pangkalan PSDKP Benoa pada awal tahun 2023 telah menetapkan 8 sasaran kegiatan dan 22 Indikator Kinerja. Namun berdasarkan ketentuan KEPMEN KP Noor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP dan adanya anggaran yang terkena *Automatic Adjustment (AA)*, pada bulan November telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dengan sasaran kegiatan menjadi 9 dan indikator kegiatan menjadi 25. Indikator Kinerja berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023 (Revisi)

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya operasi armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.3	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK2.2	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	ISK2.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (persen)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	ISK3.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (persen)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.3	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (indeks)	80
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	80
		ISK5.1.2	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75
		ISK5.1.3	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	78
		ISK5.1.5	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	80,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		ISK5.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	75
		ISK5.1.7	Nilai implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	21
		ISK5.1.8	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi)	1
		ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	92 %
		ISK5.1.10	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	77,5
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	77,5
		ISK5.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	93,75
		ISK5.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	86

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Pangkalan PSDKP Benoa dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023

Dalam pengelolaan kinerja Pangkalan PSDKP Benoa telah menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Benoa sebesar 104,75 %, yang diperoleh dari capaian indikator kinerja sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
ISK 1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	100	120
ISK 1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	98,33	112,3
ISK 1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6	92,26	105,3
ISK 1.2.3	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100	100	100
ISK 1.3.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100	100	100
ISK 2.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan (nilai)	100	100	100
ISK 2.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (persen)	100	100	100
ISK 3.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan (nilai)	100	100	100
ISK 3.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (persen)	100	100	100
ISK 4.1.1	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	120
ISK 4.1.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	87,75	109,7
ISK 4.1.3	Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif (indeks)	80	80	100
ISK 5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	80	87,46	109,3
ISK 5.1.2	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75	77,37	103,2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
ISK 5.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100	100	100
ISK 5.1.4	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	78	87,37	112
ISK 5.1.5	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	80,5	87,15	108,3
ISK 5.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	75	100	120
ISK 5.1.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	21	21,18	100,9
ISK 5.1.8	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi)	1	1	100
ISK 5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	92	96,02	104,4
ISK 5.1.10	Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	77,5	100	120
ISK 5.1.11	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	77,5	98,75	120
ISK 5.1.12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	93,75	94,59	100,9
ISK 5.1.13	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	86	90,76	105,5

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2023, Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Kegiatan 1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan

Sasaran Kegiatan 1.1. Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks).

1. Indikator Kinerja 3.1.1 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)

Capaian indikator “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)” pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Capaian indikator kinerja Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	-	-	-	-	-	-	80	100	120	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi indeks kualitas pembinaan pokmaswas adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 80. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 karena perbedaan indikator kinerja.

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif.

Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan pembinaan Pokmaswas Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Pokmaswas di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 12 Juli 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 6 (enam) Pokmaswas yaitu Pokmaswas Sinas Bahari Utama (10 orang), Pokmaswas Bunga Karang (10 orang), Pokmaswas Toro Londe (10 Orang), Pokmaswas Cumi (10 orang), Pokmaswas Lawa Duwe (10 orang) dan Pokmaswas Parafuafi (25 orang);
2. Pembinaan Pokmaswas di Hotel Dewi, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 12 November 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 3 (tiga) Pokmaswas yaitu Pokmaswas Muslim Mandiri (25 orang), Pokmaswas Mutiara Hitam (25 orang) dan Pokmaswas Jampungan (25 orang);
3. Pembinaan Pokmaswas di Apple Resort/Wr CS, Jl. Pantai Yeh Gangga, Br Bedha, Tabanan, Bali pada tanggal 18 November 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 5 (lima) Pokmaswas yaitu Pokmaswas Tirta Gangga (15 orang), Pokmaswas Giri Gangga Merta

(15 orang), Pokmaswas Baruna Gangga (15 orang), Pokmaswas Wahyu Segara (15 orang) dan Bali Turtle Konservasi Farm (15 orang).

Capaian pada tahun 2023 ini tidak terlepas dari usaha Pangkalan PSDKP Benoa dengan memberikan sosialisasi agar meningkatkan peran aktif pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, karena Pokmaswas merupakan salah satu kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat nelayan terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran aktif Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)” sebesar Rp. 300.000.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi Rp. 299.994.615,- atau 99,99%.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (%)	80	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja indeks kualitas pembinaan pokmaswas Pangkalan PSDKP Benoa sama dengan capaian satker UPT sejenis.

Sasaran Kegiatan 1.2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif ", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas; ²⁾ Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas; ³⁾ Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas;

2. Indikator Kinerja 1.2.1 : Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Capaian indikator “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada tahun 2023 sebesar 98,33 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Capaian indicator kinerja Operasi Kapal Pengawas sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	-	-	-	-	85	92,6 7	87,6	98, 33	112 ,3	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi Indeks kinerja operasi kapal pengawas adalah 98,33 dari yang ditargetkan sebesar 87,6. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan jumlah jam operasi kapal pengawas dan jumlah kapal yang diperiksa tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022 dan juga karena adanya perbedaan formula penghitungan.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pelaksanaan operasi kapal pengawas di Pangkalan PSDKP Benoa yaitu Hiu 009 pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Hiu 009 Tahun 2023

No	Periode dan Tanggal Operasi	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam	Jumlah Kapal Diperiksa	Jumlah Kapal Melanggar
1	I (15 - 28 Februari 2023)	4	123	24	3
2	II (1 - 10 April 2023)	10	104,1	35	-
3	III (9 Mei 2023)	1	9,33	2	-
4	IV (15 – 31 Mei 2023)	17	153,05	22	-
5	V (12-21 Oktober 2023)	10	94,1	24	-
6	VI (7 – 13 November 2023)	7	68,85	13	1
7	VII (18 – 26 November 2023)	9	96.1	12	-
8	VIII (2 – 11 Desember 2023)	10	88,1	25	-
Jumlah		78	736,63	157	4

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas yang telah dilaksanakan tersebut maka dengan pengukuran indeks menggunakan formulasi yang telah ditetapkan diperoleh capaian indeks kinerja operasi kapal pengawas pada tahun 2023 yaitu 98,33.

Pencapaian kinerja Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 87,6. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari

kinerja kapal pengawas Hiu 009, dimana kapal pengawas Hiu 009 didukung oleh 12 awak kapal pengawas yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatannya masing-masing dalam tugasnya di Kapal Pengawas Hiu 009, dan kondisi kapal pengawas yang dalam keadaan baik (siap operasi). Selain itu keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” sebesar Rp. 7.527.107.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 7.525.661.049,- atau 99,98%.

Tabel 3.6. Perbandingan capaian kinerja dengan Satker/UPT sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6	98,33	100	100	100	100	96,88

Capaian indikator kinerja “Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas” Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Tual namun lebih rendah dari Pangkalan PSDKP Lampulo, Bitung, Jakarta, dan Batam.

3. Indikator Kinerja 1.2.2 : Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Capaian indikator “Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas” pada tahun 2023 sebesar 92,26 dari target yang ditetapkan sebesar 85. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Operasi Speedboat Pengawas sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	-	-	-	-	85	120	87,6	92,26	105,3	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi Indeks kinerja operasi Speedboat pengawas adalah 92,26 dari yang ditargetkan sebesar 87,6. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 capaian indikator kinerja ini tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan formula penghitungan indikator kinerja. Sedangkan jumlah jam operasi dan kapal yang diperiksa tahun 2023 lebih tinggi.

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon *Illegal*, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pelaksanaan operasi speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas Tahun 2023

No	Speedboat Pengawas	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam	Jumlah Kapal Diperiksa	Jumlah Kapal Melanggar
1	Dolphin 028 (Banyuwangi)	4	17,75	12	-
2	Napoleon 007 (Benoa)	56	325,75	90	-
3	Napoleon 023 (Lombok)	24	146	154	-
4	Napoleon 053 (Probolinggo)	36	199,72	91	-
5	Rubberboat (Benoa)	21	84	45	-
6	Rubberboat (Jembrana)	39	158	272	-
Jumlah		180	931,42	664	-

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas tersebut maka dengan pengukuran indeks menggunakan formulasi yang telah ditetapkan diperoleh capaian indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada tahun 2023 yaitu 92,26.

Pencapaian kinerja Indeks Kinerja Operasi Speedboat telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 87,6. Pencapaian ini diperoleh dari speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dalam kondisi siap operasi karena selalu dilakukan perawatan baik perawatan rutin maupun darurat. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dalam melaksanakan patroli di laut.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" sebesar Rp. 931.070.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 931.000.718,- atau 99,99%.

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6	92,26	94,88	95,54	98,05	90,28	100

Capaian indikator kinerja “Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas” Pangkalan PSDKP Benoa lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Bitung, namun lebih rendah dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Lapmpulo, Batam, Jakarta dan Tual.

4. Indikator Kinerja 1.2.3 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Capaian indikator “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas” pada tahun 2023 sebesar 100 dari target sebesar 100. Sedangkan target pada tahun 2023 adalah 90. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi Indeks Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 100. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 karena perbedaan indikator kinerja.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Pemenuhan logistik kapal pengawas meliputi pemenuhan kebutuhan BBM kapal pengawas, pemenuhan kebutuhan pelumas kapal pengawas, pemenuhan bahan makanan AKP, pemenuhan kebutuhan air bersih, pemenuhan kebutuhan alat pelayanan kapal pengawas (ATK dan bahan komputer) dan pemenuhan kebutuhan senjata api.

Pada tahun 2023 Pangkalan PSDKP Benoa telah memenuhi kebutuhan logistik kapal pengawas Hiu 009 untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Tercapainya indikator kinerja ini sesuai target karena dalam pemenuhan logistik pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Benoa telah direncanakan dengan baik dan dilakukan tepat waktu. Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja pemenuhan logistic antara lain adalah pengadaan suku cadang kapal pengawas hiu 009 dilakukan secara e purchasing sesuai dengan perencanaan dan dilaksanaka tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Matriks indeks pemenuhan logistik armada kapal pengawas Pangkalan PSDKP Benoa dapat dilihat pada lampiran.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas” sebesar Rp. 7.527.107.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 7.525.661.049,- atau 99,98%.

Tabel 3.11. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja “Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas” Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama.

Sasaran Kegiatan 1.3. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen).

5. Indikator Kinerja 1.3.1 : Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)

Capaian indikator “Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)” pada tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP sampai dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen) adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja.

Pencapaian indikator kinerja ini merupakan hasil penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa. Sarana pengawasan yang ada di pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 ada 7 (tujuh) unit dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13. Sarana Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

No	Nama Sarana Pengawasan	Lokasi	Pemeliharaan dan Perawatan
1	Kapal Pengawas Hiu 009	Satwas SDKP Probolinggo	Perawatan rutin, perawatan prediktif dan perawatan darurat
2	Speedboat 8 Meter Dolphin 028	Satwas SDKP Banyuwangi	Perawatan rutin dan perawatan darurat
3	Speedboat 12 Meter Napoleon 007	Pangkalan PSDKP Benoa	Perawatan rutin dan Perawatan Darurat
4	Speedboat 12 Meter Napoleon 023	Satwas SDKP Lombok Timur	Perawatan rutin, perawatan prediktif dan perawatan darurat
5	Speedboat 12 Meter Napoleon 053	Satwas SDKP Probolinggo	Perawatan rutin dan perawatan darurat
6	Rubberboat	Pangkalan PSDKP Benoa	Perawatan rutin dan perawatan darurat
7	Rubberboat	Satwas SDKP Jembrana	Perawatan rutin dan perawatan darurat

Pencapaian indikator kinerja "Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP" tahun 2023 tercapai 100% dikarenakan semua sarana pengawasan yang ada telah dilakukan pemeliharaan dan perawatan sepanjang tahun 2023 baik itu perawatan rutin maupun perawatan darurat, sehingga operasional kapal pengawas dan speedboat maupun rubberboat dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi target. Perawatan dengan kontrak (pengadaan suku cadang) telah direncanakan dengan baik dan tepat waktu. Penyebab keberhasilan pencapaian ini didukung oleh operator speedboat yang melaksanakan tugasnya dengan baik dengan selalu memeriksa kondisi speedboat secara rutin.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja "Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP" sebesar Rp. 1.495.790.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.495.636.718,- atau 99,99%.

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (persen)	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja "Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan" Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis yaitu sama 100%.

Kegiatan 2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sasaran Kegiatan 2.1. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan.

6. Indikator Kinerja 2.1.1 : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan" dengan capaian 100%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan terdiri dari :

- b. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha jenis ikan dilindungi;
- c. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan;
- d. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan ruang laut;
- e. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
- f. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
- g. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*.

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16. Penentuan Nilai Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pencapaian nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah merupakan pencapaian dari pemeriksaan kegiatan pada tabel berikut.

Tabel 3.17. Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

NO	Kegiatan	Tahun 2023	
		Jumlah Pelaku Usaha	Nilai
1	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	20	100
2	Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan	40	100
3	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	58	100
4	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	35	100
5	Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional	17	100
6	Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	103	100
Jumlah		273	100

Pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa telah melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan polsus PWP3K di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas SDKP di bawah Pangkalan PSDKP

Benoa. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan pokmaswas serta sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan melalui media sosial.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 1.207.894.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.190.510.684,- atau 98,56 %.

Tabel 3.18. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100%.

Sasaran Kegiatan 2.2. Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan

Pencapaian sasaran kegiatan " Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan" telah diidentifikasi dalam indikator kinerja "Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (persen)".

7. Indikator Kinerja 2.2.1 : Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (persen)

Pencapaian indikator kinerja "Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan" tahun 2023 adalah 100% dari target sebesar 100%.

Tabel 3.19. Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah

dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 diperoleh dari berdasarkan tindak lanjut kegiatan berikut ini :

- Berdasarkan hasil pengawasan, PT. Tirta Mutiara Makmur bergerak di bidang pembenihan ikan air payau dan belum memiliki PKKPRL untuk saluran inlet air laut yang digunakan untuk memasok air laut dalam proses pembenihan ikan air payau. Dari hasil pengumpulan data dan informasi intelijen dapat diketahui bahwa PT. Tirta Mutiara Makmur tidak memiliki perijinan PKKPRL untuk penggunaan bangunan pipa sebagai saluran inlet yang digunakan untuk memasok air laut dalam proses pembenihan ikan air payau sebagai penunjang kegiatan hatchery udang vannamei. Dikarenakan adanya perubahan akta Perusahaan maka PT. Tirta Mutiara Makmur belum bisa memperbaharui/migrasi NIB menjadi NIB RBA sehingga tidak dapat mengurus PKKPRL karena NIB RBA menjadi salah satu syarat dalam pengurusan ijin PKKPRL.
- Tindak lanjut pengaduan terhadap Yayasan Pondok Pesantren Nurul Abror yang terindikasi melakukan reklamasi tanpa memiliki ijin. Dari hasil pengumpulan data dan informasi intelijen dapat diketahui bahwa Yayasan Pondok Pesantren Nurul Abror melakukan pemanfaatan ruang laut dari perairan pesisir untuk reklamasi dikarenakan tanah pesantren dulunya terkena abrasi sehingga dilakukan pengembalian luasan tanah dengan cara reklamasi. Pesantren Nurul Abror tidak mempunyai PKKPRL.

Pencapaian kinerja persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa telah mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan polsus PWP3K di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas SDKP di bawah Pangkalan PSDKP Benoa. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 1.207.894.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 1.190.510.684,- atau 98,56 %.

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100%.

Kegiatan 3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Sasaran Kegiatan 3.1. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Pencapaian sasaran kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan" telah diidentifikasi dalam indikator kinerja "Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan".

8. Indikator Kinerja 3.1.1 : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)

Pencapaian indikator kinerja "Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan" tahun 2023 adalah 100% dari target sebesar 100%. Capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan sampai dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja.

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha

pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut :

Tabel 3.22. Penentuan Nilai Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pencapaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23. Pemeriksaan Kepatuhan Usaha Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa

Kegiatan	Tahun 2023	
	Unit Usaha	Nilai Penyelesaian
Pemeriksaan pelaku usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan	52	100
Pemeriksaan pelaku usaha pembudidayaan ikan	96	100
Pemeriksaan pelaku usaha pengolahan ikan	167	100
Pemeriksaan pemasaran dan distribusi hasil perikanan	75	100
Total	390	100

Berdasarkan tabel di atas, berikut pencapaian masing-masing kegiatan pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan berdasarkan wilayah kerja di Pangkalan PSDKP Benoa :

Pencapaian kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Pangkalan PSDKP Benoa telah sesuai dari target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas, dimana pengawas perikanan yang tersebar di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa berjumlah 47 orang. Keberhasilan pencapaian

ini selain didukung dengan anggaran operasional dan sarana prasarana yang ada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Benoa juga didukung dengan terjalannya koordinasi yang baik Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 788.030.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 778.753.278,- atau 98,82%.

Tabel 3.24. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100%.

Sasaran Kegiatan 3.2. Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan

Pencapaian sasaran kegiatan "Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan" telah diidentifikasi dalam indikator kinerja "Persentase penyelesaian data dan informasi intelijen perikanan".

9. Indikator Kinerja 3.2.1 : Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (persen)

Pencapaian indikator kinerja "Persentase penyelesaian data dan informasi intelijen perikanan" tahun 2023 adalah 100% dari target sebesar 100%. Capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Intelijen Perikanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi Persentase penyelesaian data dan informasi intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 diperoleh dari berdasarkan kegiatan pengumpulan data pelaku usaha budidaya perikanan di Kampung Budidaya Rumput Laut di Desa Patas Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, dengan hasil sebagai berikut :

- Telah memeriksa 2 (dua) kelompok budidaya perikanan yaitu KUB Bina Karya dan Pokdakan Bina Karya Dua
- KUB Bina Karya belum memiliki perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan belum memiliki PKKPR
- Pokdakan Bina Karya Dua telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan skala usaha tetapi belum memiliki dokumen PKKPR
- Rekomendasi untuk kedua pelaku usaha tersebut adalah agar segera melakukan pengurusan ijin PKKPR

Pencapaian kinerja persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa telah mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Pencapaian ini diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan PPNS di Pangkalan PSDKP Benoa maupun di Satwas SDKP di bawah Pangkalan PSDKP Benoa. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan adanya koordinasi Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 788.030.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 778.753.278,- atau 98,82%.

Tabel 3.26. Perbandingan Capaian dengan Satker UPT/ Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100%.

Kegiatan 4. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu : ¹⁾ Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks); ²⁾ Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks); ³⁾ Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (indeks).

10. Indikator Kinerja 4.1.1 : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)

Capaian indikator "Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan" pada tahun 2023 sebesar 100 dari target yang ditetapkan 80. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	80	100	120	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100 dari yang ditargetkan sebesar 80. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 karena ini merupakan indikator kinerja baru.

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang dalam hal ini Pangkalan PSDKP Benoa, untuk :

- a) Pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- b) Pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Perhitungan pengenaan sanksi bidang kelautan dan perikanan untuk capaian indikator kinerja ini merupakan jumlah dari pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan pertama dibagi jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose. Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2023 telah menangani 8 (delapan) kasus pelanggaran yang terdiri dari 7 (tujuh) kasus bidang perikanan dan 1 (satu) kasus bidang kelautan, dimana semuanya telah diekspose dan telah ditetapkan sanksi administrasinya yaitu 4 (empat) kasus ditetapkan teguran tertulis 1 dan 4 (empat) kasus ditetapkan denda administratif. Sehingga diperoleh capaian indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 100%. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas perikanan, polsus PWP3K dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 47 orang, polsus PWP3K sebanyak 16 orang dan PPNS berjumlah 20 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki PPNS Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait kasus-kasus yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan” Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 150.400.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 150.207.674,- atau 99,87%.

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	100	86,79	100	100	100

Capaian indikator kinerja indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama 100 kecuali Pangkalan PSDKP Batam dengan capaian 86,79.

11. Indikator Kinerja 4.1.2 : Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)

Capaian indikator “Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan” pada tahun 2023 sebesar 87,75 dari target yang ditetapkan 80. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	80	87,75	109,7	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan ingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah 87,75% dari yang ditargetkan sebesar 80%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 karena ini merupakan indikator kinerja baru.

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan indeks diperoleh dari jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa dibagi jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis pemantauan.

Pada tahun 2023 di Pangkalan PSDKP Benoa terdapat 49 dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan dan yang telah diperiksa sebanyak 43 orang/pelaku usaha. Sehingga diperoleh capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa adalah 87,75%. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas perikanan dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 47 orang dan PPNS berjumlah 20 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki PPNS Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait kasus-kasus yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja "indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan" Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 150.400.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 150.207.674,- atau 99,87%.

Tabel 3.30. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan	80	87,75	100	73,59	74,1	100	58,99

Capaian indikator kinerja indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Benoa lebih rendah dari Pangkalan PSDKP Lampulo dan Bitung, tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Batam, Jakarta dan Tual.

12. Indikator Kinerja 4.1.3 : Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (indeks)

Capaian indikator “Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif” pada tahun 2023 sebesar 80 dari target yang ditetapkan 80. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.31. Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif	-	-	-	-	-	-	80	80	100	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023 realisasi Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Benoa adalah 80 dari yang ditargetkan sebesar 80. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 karena ini merupakan indikator kinerja baru.

Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif merupakan tingkat pencapaian kinerja monev pengenaan sanksi administratif oleh Pangkalan PSDKP Benoa. Perhitungan indeks ini diperoleh dari jumlah nilai tahapan monev pengenaan sanksi administratif dibagi jumlah pelaksanaan monev pengenaan sanksi administratif. Pada tahun 2023 di Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan monev pengenaan sanksi administratif dan capaian Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Benoa adalah 80%. Pencapaian ini diperoleh dari hasil dari kinerja pengawas perikanan dan PPNS di lingkup Pangkalan PSDKP Benoa, dimana jumlah pengawas perikanan pada lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 47 orang, porsus PWP3K sebanyak 16 orang dan PPNS berjumlah 20 orang. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung oleh kompetensi yang dimiliki PPNS Pangkalan PSDKP Benoa yang dapat menganalisa dengan baik terkait kasus-kasus yang ada di Pangkalan PSDKP Benoa serta adanya koordinasi yang baik antara Pangkalan PSDKP Benoa dengan instansi terkait.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif” Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 150.400.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 150.207.674,- atau 99,87%.

Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks penyelesaian tindak lanjut peneraan sanksi administratif	80	80	63,64	86,79	100	100	100

Capaian indikator kinerja indeks penyelesaian tindak lanjut peneraan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Benoa lebih rendah dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Batam, Jakarta, Bitung dan Tual tetapi lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kegiatan 5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran Kegiatan 5.1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP", Pangkalan PSDKP Benoa telah mengidentifikasi 13 indikator kinerja yaitu : ⁽¹⁾ Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks); ⁽²⁾ Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai) ⁽³⁾ Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen); ⁽⁴⁾ Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks); ⁽⁵⁾ Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai); ⁽⁶⁾ Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen); ⁽⁷⁾ Nilai implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai); ⁽⁸⁾ Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi); ⁽⁹⁾ Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen); ⁽¹⁰⁾ Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen); ⁽¹¹⁾ Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen); ⁽¹²⁾ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai); ⁽¹³⁾ Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai). Capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan "Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Benoa" disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.33. Capaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP pada Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	80	87,46	109,3
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75	77,37	103,2

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100	100	100
Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	78	87,37	112
Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	80,5	87,15	108,3
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	75	100	120
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	21	21,18	100,9
Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi)	1	1	100
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	92	96,02	104,4
Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	77,5	100	120
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	77,5	98,75	120
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	93,75	94,59	100,9
Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	86	90,76	105,5

13. Indikator Kinerja 5.1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan SLO yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Benoa.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2023 adalah 87,46 dan telah memenuhi target sebesar 80 dengan capaian 109,3%. Nilai tersebut diperoleh karena pelayanan yang diberikan terhadap pengguna layanan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pelayanan penerbitan SLO lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dilaksanakan pada beberapa satwas maupun wilker sebagai berikut :

1. Pangkalan PSDKP Benoa
2. Satwas SDKP Lombok Timur
3. Wilker SDKP Teluk Awang
4. Wilker SDKP Tanjung Luar
5. Wilker SDKP Sape
6. Satwas SDKP Jembrana

- 7. Satwas SDKP Banyuwangi
- 8. Wilker PP Masami
- 9. Wilker SDKP Tanjung Wangi
- 10. Satwas SDKP Probolinggo

- 11. Satwas SDKP Lamongan
- 12. Wilker SDKP Bulu
- 13. Wilker SDKP Gresik
- 14. Wilker SDKP Tuban

Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata IKM Pangkalan PSDKP Benoa dari triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV sebagai berikut :

- Triwulan I : 88,77
- Triwulan II : 85,98
- Triwulan III : 87,05
- Triwulan IV : 88,04
- Tahun 2023 (rata-rata) : 87,46

Tabel 3.34. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	80	89,84	80	91,11	80	90,17	80	87,46	109,3	80

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, mengalami penurunan atau lebih rendah, hal ini disebabkan karena para pengguna layanan masih adaptasi terkait aplikasi yang baru diterapkan yaitu e-PIT dan juga karena pengguna layanan belum terbiasa dengan survey yang dilaksanakan menggunakan barcode. Pangkalan PSDKP Benoa selalu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para nelayan dan stakeholder. Salah satu upaya yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan sosialisasi aplikasi tersebut kepada pengguna layanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.

Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan” sebesar Rp. 51.831.000,- dan sampai 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 51.773.266,- atau 99,89%.

Tabel 3.35. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan (indeks)	80	87,46	78,82	89	87,19	88,07	99,29

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Pangkalan PSDKP Benoa lebih tinggi dibandingkan

dengan Pangkalan PSDKP Lampulo dan Jakarta, dan lebih rendah dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Batam, Bitung dan Tual.

14. Indikator Kinerja 5.1.2 : Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)

Capaian indikator kinerja “Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)” pada tahun 2023 adalah 77,37. Capaian ini telah memenuhi dari target yang ditetapkan yaitu 75 dengan persentase capaian 103,16 %. Pencapaian ini didukung oleh seluruh pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang berjumlah 102 orang, dimana seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Benoa telah melaksanakan tugas sesuai dengan surat keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Benoa dalam Pembangunan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi. Capaian indikator kinerja 11 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.36. Capaian Nilai WBK Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75	82,88	75	84,98	75	82,87	75	77,37	103,16	-

Nilai WBK (pemantauan) Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 adalah 77,37, dengan nilai komponen pengungkit 41,25 dan nilai hasil 36,13. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan nilai WBK tahun 2022 (82,87). Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 ada penurunan nilai pada penataan tatalaksana karena penyesuaian probis.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Nilai WBK Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp.2.500.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau 100%.

Tabel 3.37. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75	77,37	93,89	90,9	85,95	79,49	81,52

Capaian indikator kinerja Nilai WBK Pangkalan PSDKP Benoa paling rendah apabila dibandingkan dengan satker/UPT sejenis.

15. Indikator Kinerja 5.1.3 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Capaian indikator “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)” pada tahun 2023 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Capaian pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022, karena merupakan indikator kinerja baru. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.38. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Penilaian risiko dilakukan melalui form penilaian risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Dari form pemantauan risiko Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2023 memiliki 23 rencana pengendalian risiko dan 23 realisasi pengendalian risiko, sehingga capaian persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup PSDKP Benoa adalah 100%. Tercapainya indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pendampingan penyusunan manajemen risiko oleh Setditjen PSDKP serta rapat internal Pangkalan PSDKP Benoa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian yang bersifat rutin, berkala dan dengan pendekatan manajemen risiko.

Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)” sebesar Rp. 48.000.000,- dan sampai 31 Desember 2023 telah terealisasi Rp. 47.839.823,- atau 99,67%.

Tabel 3.39. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Nilai WBK Pangkalan PSDKP Benoa apabila dibandingkan dengan satker UPT sejenis adalah sama yaitu 100%.

16. Indikator Kinerja 5.1.4 : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bena

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Capaian indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bena” pada tahun 2023 adalah 87,37. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pada yaitu 78 dengan persentase capaian 112%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.40. Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bena

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bena (Indeks)	72	66,24	73	78,73	77	81,42	78	87,37	112	72

Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, mengalami kenaikan. Hal ini terlihat pada nilai kualifikasi dan nilai kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan ASN Pangkalan PSDKP Bena telah melakukan penyesuaian ijazah terakhir setelah mengikuti tugas atau ijin belajar serta para pegawai telah melakukan diklat maupun bimbingan teknis selalu memperbaharui data dan menggunggah sertifikat pada aplikasi e-pegawai. Diklat maupun bimbingan teknis yang telah diikuti pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41. Data Diklat dan Bimbingan Teknis yang Diikuti Tahun 2023

No	Diklat atau Bimbingan Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti
1	Pelatihan Selam Tingkat Dasar dan Lanjutan	22
2	Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	11
3	Peningkatan Kapasitas PPNS	4
4	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Berbasis Resik	4
5	Penguatan Kapasitas di Bidang Kehumasan	3
6	Uji Kompetensi PBJP Level 1	3
7	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Administrasi	3
8	Coaching Clinic Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Kelautan dan Perikanan	3
9	Penyegaran Teknis Menembak	2
10	Bimbingan Teknis Simulasi Pengawasan Program Penangkapan Ikan Terukur	2
11	Bimbingan Teknis Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	2
12	Diklat Reguler Polsus PWP3K	2
13	Bimbingan Teknis Identifikasi Jenis Ikan Hiu dan Pari Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2
14	Pelatihan Maritime Domain Awareness Foundation Courses Training	2

No	Diklat atau Bimbingan Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti
15	Bimtek Budaya Pelayanan Prima	2
16	Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Aparat Penegak Hukum	1
17	Program Kepemimpinan Maritim Sipil	1
18	Pelatihan Pemulihan Aset dari Kejahatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1
19	Pelatihan Kompetensi PBJP Level I	1
20	Bimtek Pengelolaan Kinerja	2
21	Pelatihan (E-Learning dan Microlearning) pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	1

Capaian indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bena” pada tahun 2023 sebesar 87,37 dengan jumlah pegawai yang dihitung 63 orang dan diperoleh dari perhitungan berdasarkan penilaian 4 variabel, sebagai berikut:

Tabel 3.42. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bena Tahun 2023

Aspek/Komponen	Tahun 2023		
	Bobot	Nilai	%
Kualifikasi	25	20,7	82,8
Kompetensi	40	36,7	91,75
Kinerja	30	25	83,33
Disiplin	5	4,97	99,4
IP ASN PANGKALAN PSDKP BENOA	100	87,37	87,37

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp.100.000.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 99.967.203,- atau 99,97%.

Tabel 3.43. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Bena	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Indeks profesionalitas ASN (indeks)	78	87,37	84,39	89,04	83,17	87,2	90,63

Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bena lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Lampulo, Jakarta dan Bitung, tetapi lebih rendah dari Pangkalan PSDKP Batam dan Tual.

17. Indikator Kinerja 5.1.5 : Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Bena

Capaian indikator kinerja “Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Bena” pada tahun 2023 adalah 87,15. Capaian ini memenuhi target yang ditetapkan yaitu 80,5 dengan capaian 108,3%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.44. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	-	-	-	-	-	-	80,5	87,15	108,3	-

Indikator kinerja "Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa" pada tahun 2023 tercapai dengan nilai 87,15 dengan persentase capaian 108,3%. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja.

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian dilakukan pada lembar kerja evaluasi SAKIP pada aplikasi Kinerjaku oleh tim pengelola kinerja Ditjen PSDKP.

Nilai mandiri SAKIP kinerja merupakan nilai akumulasi dari 4 aspek penilaian yaitu perencanaan kinerja (bobot 30%), pengukuran kinerja (bobot 30%), pelaporan kinerja (bobot 15%) dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%). Berikut adalah nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Benoa pada tiap aspek :

Tabel 3.45. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023

Nilai	Aspek Penilaian			
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Bobot	30%	30%	15%	25%
Nilai	25,20	27	12,45	22,50
Total Nilai	87,15			

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp.11.000.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,- atau 100%. Kegiatan yang mendukung dalam tercapainya indikator kinerja ini antara lain adalah Pangkalan PSDKP Benoa melaksanakan rapat dalam perencanaan anggaran dan kinerja dan evaluasi kinerja serta mengikuti kegiatan perencanaan baik perencanaan anggaran maupun kinerja dan mengikuti kegiatan workshop SAKIP lingkup Ditjen PSDKP serta menyusun laporan kinerja tepat waktu.

Tabel 3.46. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Penilaian Mandiri SAKIP (nilai)	80,5	87,15	79,5	81,25	79,25	80,55	82,65

Capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa paling tinggi dibandingkan dengan Satker/UPT sejenis yang lain.

18. Indikator Kinerja 5.1.6 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Benoa berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2022 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2023 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Hingga 31 Desember 2023 1 (satu) rekomendasi telah ditindaklanjuti hingga tuntas dari 1 (satu) rekomendasi dalam LHP.

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022 yaitu 100%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.47. Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sampai dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	-	-	-	75	100	75	100	120	-

Tabel 3.48. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	75	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) sama dengan satker/UPT sejenis kecuali Pangkalan PSDKP Lampulo.

19. Indikator Kinerja 5.1.7 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)

Capaian indikator kinerja “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)” pada tahun 2023 adalah 21,18. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 21 dengan persentase capaian 100,9%. Capaian indikator kinerja 13 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.49. Capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Nilai implementasi program budaya kerja Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	-	-	-	-	21	26,68	21	21,18	100,9	-

Indikator kinerja "Nilai implementasi program budaya kerja Pangkalan PSDKP Benoa" pada tahun 2023 tercapai dengan nilai 21,18.

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Pangkalan PSDKP Benoa. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan tim budaya kerja Satker menggunakan LKE pelaksanaan program budaya kerja. Dimana dalam LKE tersebut telah ada nilai dari implementasi dari 11 program budaya kerja yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU), nilai 3;
2. Lima menit sebelum jadwal, nilai 2;
3. Ringkas, rapi, resik, rawat rajin (5R) nilai 0,66;
4. Upayakan data terkini (UPDATE), nilai 1;
5. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi dan Arsipkan (ORCA), nilai 2,34;
6. Tegakkan aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT), nilai 0,67;
7. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA), nilai 0,67;
8. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK), nilai 1;
9. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP), nilai 2,67;
10. Hargai, Motivasi dan Inisiatif (HARMONIS), nilai 1,5;
11. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green), nilai 2.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain adalah telah dilaksanakan sosialisasi budaya kerja ASN BerAkhlak melalui zoom meeting yang diadakan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP dan diikuti oleh seluruh pegawai, kegiatan ini bertujuan agar seluruh pegawai dapat memahami dan menerapkan budaya kerja ASN BerAkhlak pada kehidupan kerja sehari-hari dan penerapan aspek-aspek budaya kerja yang pada kegiatan pekerjaan sehari-hari seperti ketepatan waktu saat menghadiri pertemuan, menerapkan 5R, dan *go green* dalam melaksanakan pekerjaan.

Dibandingkan dengan nilai budaya kerja tahun 2022 (26,68), capaian tahun 2023 (21,18) mengalami penurunan, hal ini karena ada penurunan nilai pada beberapa kriteria antara lain yaitu kriteria HIU, 5R, ORCA, MANTAP, HARMONIS dan Go

Green. Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 76.250.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 75.988.329,- atau 99,66%.

Tabel 3.50. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21	21,18	22,01	28,18	23,83	25,51	29,84

Capaian indikator kinerja Nilai implementasi program budaya kerja Pangkalan PSDKP Benoa paling rendah dibandingkan dengan Satker/UPT sejenis yang lain.

20. Indikator Kinerja 5.1.8 : Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi)

Capaian indikator kinerja “Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa” pada tahun 2023 adalah 1. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 dengan persentase capaian 100%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.51. Capaian Unit Kerja yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa	-	-	1	1	1	1	1	1	100	-

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi: umum, replikasi, khusus. Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan; telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi kelompok umum dan khusus serta telah diimplementasikan 1 tahun bagi kelompok replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut.

Indikator kinerja unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik yang dihasilkan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2023 adalah inovasi aplikasi KADEK DINA.

Inovasi KADEK DINA (Kartu Kendali Operasional Kendaraan Dinas) adalah inovasi yg dihasilkan oleh Tim GKT Pangkalan PSDKP Benoa dalam rangka mengimplementasikan salah satu program budaya kerja Ditjen PSDKP yaitu HIU (Hasilkan Inovasi Unit kerja). Inovasi tersebut tercipta dari adanya masalah terkait operasional maupun pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak tercatat dengan baik. Mengingat di Pangkalan PSDKP Benoa memiliki tingkat kesibukan operasional kendaraan dinas yg padat. Inovasi tersebut hadir untuk memudahkan para Pengelola Keuangan maupun Pengelola BMN dalam mendokumentasikan/mencatat dan memonitoring operasional kendaraan dinas secara realtime serta dalam satu database.

Capaian Indikator kinerja ini pada tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022. Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp. 76.250.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 75.988.329,- atau 99,66%.

Tabel 3.52. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Inovasi yang dihasilkan unit kerja	1	1	1	1	1	1	1

Capaian indikator kinerja unit kerja yang menerapkan inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa sama dengan Satker/UPT sejenis yang lain. Namun nilai inovasi Pangkalan PSDKP Benoa paling rendah yaitu 70,9 karena inovasi aplikasi ini masih baru dan belum diterapkan.

21. Indikator Kinerja 5.1.9 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Capaian indikator kinerja “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa” pada tahun 2023 adalah 100% yang diperoleh dari komponen keaktifan pada aplikasi *Collaboration Office*, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Pegawai yang wajib dinilai adalah Kepala unit kerja dan ketua tim kerja.

Tabel 3.53. Capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa	82	78,61	84	87,36	86	100	92	96,02	104,4	82

Tercapainya indikator kinerja ini sesuai target didukung oleh data dan informasi yang disampaikan pada aplikasi *Collaboration Office* telah memenuhi kriteria dan mencakup kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan Pangkalan PSDKP Benoa. Capaian indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada triwulan I dan triwulan IV ada ketua tim kerja yang tidak aktif pada aplikasi *Collaboration Office* sehingga persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa tidak mencapai 100%.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp. 46.600.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 46.600.000,- atau 100%.

Tabel 3.54. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86	96,02	102,98	105,09	96,48	95,23	108,01

Capaian indikator kinerja persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) lebih tinggi dari Pangkalan PSDKP Bitung namun lebih rendah dari Pangkalan PSDKP Jakarta, Lampulo, Batam dan Tual.

22. Indikator Kinerja 5.1.10 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Capaian indikator kinerja “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa” pada tahun 2023 adalah 100%. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 77,5% dengan persentase capaian 120%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.55. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)			72,5	95	75	97,5	77,5	100	120	

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN yaitu suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 20%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Triwulan IV tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bena pada tahun 2023 adalah 100 % melebihi dari target yang di ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 77,5% dengan persentase capaian 120%, pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN pada Pangkalan PSDKP Bena telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku, serta didukung oleh adanya operator pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Bena yang kompeten. Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami peningkatan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini sebesar Rp.22.000.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp.22.000.000,- atau 100%.

Tabel 3.56. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Bena	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN (%)	77,5	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bena sama dibandingkan dengan Satker/UPT sejenis yang lain.

23. Indikator Kinerja 5.1.11 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bena

Capaian indikator kinerja “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bena” pada tahun 2023 adalah 98,75%. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 77,5% dengan persentase capaian 120%. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.57. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (%)	-	-	72,5	100	75	100	77,5	98,75	120	-

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa yaitu suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/ Jasa lingkup unit kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian indikator kinerja ini tahun 2023 dengan nilai capaian 98,75 melebihi dari target yang di tetapkan pada Tahun 2023 sebesar 77,5 dengan persentase capaian 120,00%, pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pangkalan PSDKP Benoa telah sesuai dengan aturan dan kaidah yang ada dan didukung oleh kerja sama yang baik tim pengadaan barang dan jasa Pangkalan PSDKP Benoa. Capaian indikator kinerja ini lebih rendah dari capaian pada tahun 2022.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sebesar Rp. 6.341.211.000-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 6.340.116.038,- atau 99,98%.

Tabel 3.58. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa (%)	77,5	98,75	98,75	94,38	93,39	95,04	95,04

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Benoa sama dengan Pangkalan PSDKP Lampulo namun lebih tinggi dibandingkan dengan Pangkalan PSDKP Batam, Jakarta, Bitung dan Tual.

24. Indikator Kinerja 5.1.12 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran ini merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja

Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 3.59. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	88	97,3	89	95,15	89	91,21	93,75	94,59	100,9	88

Capaian indikator kinerja “Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Benoa” Tahun 2023 adalah sebesar 94,59 dari target sebesar 93,75. Rincian capaian indikator sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.60. Rincian Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Aspek		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10	10	81,02
	Deviasi Halaman III DIPA	62,03	10	6,2	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	96,81	20	19,36	97,42
	Belanja Kontraktual	93,33	10	9,33	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengeolaan UP dan TUP	96,94	10	9,69	
	Dispensasi SPM	100	5	5	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100	25	25	100
Nilai Total		94,59			
Konversi Bobot		100%			
Nilai Akhir		94,59			

Nilai IKPA lingkup Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 91,21. Pada tahun 2023 ada 13 kali revisi dan tidak memperbaharui halaman III DIPA di setiap revisi. Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 213.050.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 211.529.851,- atau 99,29%.

Tabel 3.61. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)(nilai)	93,75	94,59	93,52	91,59	90,71	94,45	92,82

Capaian indikator kinerja nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Benoa paling tinggi dari Satker/UPT sejenis lainnya.

25. Indikator Kinerja 5.1.13 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Benoa” Tahun 2023 adalah sebesar 90,76 dari target sebesar 86. Rincian capaian Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.62. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pangkalan PSDKP Benoa

Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023			2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	%	T
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (Nilai)	-	-	86	84,47	81	87,87	86	90,76	105,5	-

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan perhitungan dari 4 unsur sub komponen yaitu : Penyerapan anggaran, Konsistensi, Capaian keluaran, dan Nilai efisiensi.

Nilai diperoleh dari data capaian output yang dimasukkan dalam aplikasi SAKTI dan dipantau pada aplikasi SMART Kemenkeu. Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi tersebut Nilai Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 sebesar 90,76, dengan uraian :

- Penyerapan anggaran : 99,08
- Konsistensi : 99,92
- Capaian Keluaran : 100
- Nilai efisiensi : 7,22

Nilai NKA Pangkalan PSDKP Benoa 90,76 lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditargetkan 86, dengan nilai capaian 105,5%. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 karena nilai konsistensi dan nilai efisiensi pada tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini sebesar Rp. 213.050.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 211.529.851,- atau 99,29%.

Tabel 3.63. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Satker/UPT Sejenis

Indikator Kinerja	Target	Capaian					
		Benoa	Lampulo	Batam	Jakarta	Bitung	Tual
Nilai kinerja anggaran (NKA) (nilai)	86	90,76	84,96	86,5	84,82	85,88	87,58

Capaian indikator kinerja Nilai kinerja anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Benoa paling tinggi dari Satker/UPT sejenis lainnya.

C. Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Pangkalan PSDKP Benoa.

1. Optimalisasi penggunaan media daring untuk rapat lingkup Pangkalan PSDKP Benoa

Sebagai upaya untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan SDKP mencakup Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Benoa dilakukan pertemuan rapat secara berkala secara daring. Selanjutnya, mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan rekonsiliasi kegiatan juga dilakukan secara daring. Melalui mekanisme ini alokasi anggaran pertemuan di luar kota dan perjalanan dinas dapat dihemat dan dialokasikan untuk output lain yang lebih diprioritaskan.

2. Efisiensi sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Benoa

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 sumber daya manusia yang mendukung Pangkalan PSDKP Benoa berjumlah 102 orang, dimana fungsional umum dan AKP berjumlah 30 orang, pengawas perikanan 47 orang, polsus PW3K 16 orang, PPNS 20 orang dan PPNPN berjumlah 26 orang. Pengawas perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa tidak hanya memiliki kompetensi sebagai pegawai perikanan saja tetapi juga memiliki kompetensi sebagai polsus WP3K, PPNS, pejabat pengadaan barang dan jasa, bendahara, serta petugas operator penatausahaan. Maka dari itu, efisiensi SDM Pangkalan PSDKP Benoa sangat berpengaruh positif dalam pencapaian kinerja tahun 2023.

3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Pangkalan PSDKP Benoa

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Lingkup Pangkalan PSDKP Benoa. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Pangkalan PSDKP Benoa berdasarkan data realisasi output KRO pada aplikasi SMART kementerian keuangan sebesar 7,22.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Benoa TA. 2023 sebesar Rp. 31.934.433.000,-. Setelah mengalami *automatic adjustment* dan revisi anggaran menjadi Rp. 27.832.432.000,- Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2023 sebesar Rp. 27.576.997.062,- dengan persentase 99,08%. Rincian

realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.64. Realisasi Anggaran per Kegiatan

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	10.253.967.000	10.252.292.979	99,98
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	200.400.000	200.099.592	99,85
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.207.894.000	1.190.510.684	98,56
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	788.030.000	778.753.278	98,82
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	15.382.141.000	15.155.340.529	98,53
TOTAL		27.832.432.000	27.576.997.062	99,08

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Benoa tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kegiatan Pangkalan PSDKP Benoa pada tahun 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Capaian kinerja Pangkalan PSDKP tahun 2023 Secara keseluruhan dinyatakan berhasil dengan nilai kinerja organisasi mencapai 104,75 % dengan realisasi anggaran sebesar 99,08%
3. Hasil capaian indikator kinerja pada tahun yang diperjanjikan sudah seluruhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian Pangkalan PSDKP Benoa akan terus meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Benoa untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekomendasi Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Benoa Tahun 2023

NO	Hal yang Harus Menjadi Perhatian	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	Keaktifan dalam aplikasi <i>Coolaboration Office</i>	Memo / Instruksi Unit Kerja
2	Inovasi yang dihasilkan	Belum diterapkan	Menerapkan inovasi yang telah ada



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditijenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andri Fahrulsyah**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Benoa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa


Andri Fahrulsyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENOA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya operasi armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
		ISK1.2.3	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK1.3.1	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK2.2	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	ISK2.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (persen)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK3.2	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	ISK3.2.1	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (persen)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.3	Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif (indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	80
		ISK5.1.2	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (nilai)	75
		ISK5.1.3	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	100
		ISK5.1.4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (indeks)	78
		ISK5.1.5	Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	80,5
		ISK5.1.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Benoa yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	75
		ISK5.1.7	Nilai implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	21
		ISK5.1.8	Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Benoa (inovasi)	1
		ISK5.1.9	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	92 %
		ISK5.1.10	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	77,5
		ISK5.1.11	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (persen)	77,5
		ISK5.1.12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	93,75
		ISK5.1.13	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Benoa (nilai)	86

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	10.253.967.000
SK1.1	<i>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif</i>	
SK1.2	<i>Terselenggaranya operasi armada Pengawasan SDKP yang efektif</i>	
SK1.3	<i>Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan</i>	
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.207.894.000
SK2.1	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan</i>	
SK2.2	<i>Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan</i>	
Kegiatan 3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	788.030.000
SK3.1	<i>Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan</i>	
SK3.2	<i>Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan</i>	
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	200.400.000
SK4.1	<i>Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas</i>	
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15.382.141.000
SK5.1	<i>Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP</i>	
Total Anggaran		27.832.432.000

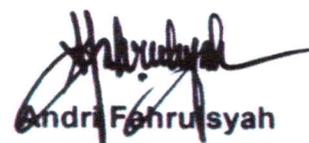
Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa



Andri Fehrulsyah